



**[KAJIAN PEMETAAN POTENSI LAUT DAN
KAWASAN PESISIR DALAM RANGKA
PEMETAAN MENDUKUNG LAMPUNG SEBAGAI
BAGIAN POROS MARITIM INDONESIA]**

**[KERJA SAMA ANTARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA]**

2015

PENDAHULUAN

Lampung adalah sebuah provinsi paling Selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah Utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung menyimpan potensi kelautan dan pesisir yang besar. Sebagai contoh, Provinsi Lampung menyumbangkan 45% penghasil Udang di Indonesia.

Pelabuhan utama Lampung adalah Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung, sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Secara geografis, posisi Lampung berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan berjarak kurang dari 700 km dari selat terpadat di dunia, selat Malaka. Sekitar 2/3 dari wilayah di Lampung memiliki wilayah pesisir. Jarak Lampung dari Ibu

Kota Jakarta sekaligus Pelabuhan terbesar di Indonesia kurang dari 250 Km.

Gambar 1

Peta Wilayah Studi



Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi poros Maritim Indonesia melalui pemetaan potensi laut dan pesisir. Sedangkan sasaran yang perlu dicapai untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Adanya peta potensi laut dan pesisir Provinsi Lampung
- Adanya skenario pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan potensi
- Adanya strategi pengembangan potensi laut dan pesisir Provinsi Lampung

Wilayah studi dari penelitian ini meliputi 7 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan,

Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran.

METODOLOGI

Kajian isu strategis Maritim Lampung membahas beberapa variabel yang menjadi pertimbangan yang menentukan variabel dan aspek untuk menentukan Lampung sebagai Poros Maritim Indonesia. Dasar pemikirannya adalah berbasis kelautan dan pesisir. Di dalam isu strategis, variabel yang dibahas meliputi Lampung sebagai Provinsi yang dilalui oleh pelayaran Internasional, selain itu membahas pula mengenai wilayah-wilayah mana saja di Provinsi Lampung yang memiliki pesisir, kesesuaian guna lahan, ancaman bahaya, kedalaman laut, potensi obyek strategis dan kebijakan yang mendukung tercapainya sebagai poros maritim Indonesia.

Masing-masing variabel tersebut memiliki interval penilaian 1-5. Kemudian hasil penilaian dimasukan ke dalam tabel untuk ditotal. Basis penilaian adalah kecamatan di dalam kabupaten yang memiliki wilayah pesisir. Kemudian hasil penilaian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, sangat direkomendasikan (nilai total >30),

direkomendasikan (nilai total > 25) dan tidak direkomendasikan (1-25). Total nilai ini nantinya menjadi dasar untuk menentukan kawasan strategis di Provinsi Lampung yang dapat mendukung pencapaian Lampung sebagai Poros Maritim.

Tabel 1
Variabel Penilaian Lokasi Potensial

No	Komponen Penilaian	Referensi
1	Jarak Terhadap Jalur Pelayaran Internasional	Pertimbangan Strategis/Kepmenhub No KM 53 Tahun 2002
2	Akses terhadap Pesisir	Pertimbangan Geostrategis
3	Kesesuaian Guna Lahan	Pertimbangan terhadap kesesuaian dengan rencana tata ruang Nasional/Provinsi/Kabupaten
4	Ancaman Bahaya	Pertimbangan Geostrategis/Peta indeks Rawan Bencana BNPB
5	Kedalaman Laut	Rekomendasi Teknis Pembangunan Pelabuhan/Biaya/Kepmenhub No KM 53 Tahun 2002
6	Potensi Obyek Strategis/Sumber Daya Lokal	Pertimbangan Potensi Setempat/RPJMN/RIPIN/Rencana Pariwisata Nasional PP No 50 Tahun 2011/Obyek Strategis/Sumber daya alam potensial
7	Kebijakan	Pertimbangan Dukungan Pemerintah Pusat

Sumber:Disarikan dari berbagai sumber , 2015

Sebagai tambahan, ditambahkan beberapa aspek sebagai pertimbangan

yang dapat menjadi pendukung Lampung sebagai poros maritim. Aspek yang dimaksud adalah aspek ekonomi, aspek fisik dan lingkungan, aspek transportasi, aspek sosial budaya dan kependudukan. Ada pun penjelasan mengenai komponen penilaian sebagai berikut.

- a. Jarak Provinsi Lampung terhadap Jalur Pelayaran Internasional Seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki wilayah laut masuk ke dalam zona pelayaran internasional. Kriteria yang menjadi dasar adalah jarak sejauh < 500 Mil berdasarkan klasifikasi oleh Kementerian Perhubungan.
- b. Akses terhadap pesisir Terdapat 7 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki wilayah laut. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran.
- c. Kesesuaian guna lahan

Kesesuaian guna lahan menjadi dasar dalam menentukan kawasan strategis di wilayah Provinsi Lampung. Guna lahan amat menentukan apakah lahan yang dimaksud dapat digunakan untuk kawasan budidaya atau tidak. Kesesuaian lahan yang paling mendasar adalah apakah kawasan tersebut masuk ke dalam kawasan konservasi atau budidaya.

- d. Ancaman bahaya Pulau Sumatera memiliki ancaman bahaya yang khususnya gempa dan tsunami. Di sepanjang pantai Barat Sumatera dan di bagian Barat pulau Sumatera terdapat lempeng dan patahan aktif. Data mencatat, terdapat beberapa kali gempa yang disebabkan pergerakan lempeng dan patahan. Wilayah di Lampung yang memiliki potensi ancaman bahaya tinggi terdapat pada bagian Barat dan Selatan sedangkan bagian Timur relatif rendah. Penilaian didasarkan terhadap peta indeks kerawanan bencana provinsi Lampung yang dikeluarkan oleh

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- e. Kedalaman Laut
- Kedalaman laut di Provinsi Lampung secara umum dapat dibagi menjadi 4 zonasi. Zona pertama adalah bagian barat yang menghadap ke Samudera Hindia dengan rata-rata kedalaman laut 10 m. Sebenarnya pada zona ini masih memadai dimanfaatkan sebagai obyek strategis maritim namun kedalaman laut di pesisir ini masih kurang optimal untuk keperluan obyek strategis seperti Pelabuhan. Zona kedua ialah di Teluk Semangka dengan rata-rata kedalaman laut 60 m. Zona ketiga di Teluk Lampung dengan kedalaman rata-rata 25 m. Kemudian zona keempat yaitu di Pesisir Timur dengan rata-rata kedalaman laut 5m. Untuk mengetahui kedalaman laut di Pesisir Provinsi Lampung digunakan data pendekatan rata-rata kedalaman dalam satu kawasan. Data diambil dari Atlas Pesisir Provinsi Lampung pada tahun 1999. Kedalaman laut di Kawasan Pesisir Provinsi Lampung dijelaskan lebih rinci pada gambar berikut.
- f. Potensi obyek strategis/sumber daya
- Bagi kawasan yang teridentifikasi memiliki obyek strategis pada level nasional, provinsi maupun kabupaten memiliki nilai tambah. Hal ini didasari atas hasil kajian terhadap dokumen dan survey lapangan. Sebagai contoh obyek strategis yang dimaksud seperti Pelabuhan Hub Internasional Panjang, Industri Maritim, Keindahan Pantai. Selain itu, sumber daya potensial seperti budi daya udang menjadi pertimbangan.
- g. Kebijakan yang Mendukung
- Beberapa obyek strategis yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pelabuhan, wisata, dan industri. Untuk pelabuhan, kebijakan terdapat pada level yang lebih tinggi dari provinsi. Dengan demikian, kebijakan sangat strategis dalam menentukan penilaian kawasan strategis. Untuk wisata, provinsi memiliki peran

yang lebih besar dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di dalamnya.

TINJAUAN POTENSI KEBIJAKAN

Pembangunan di Provinsi Lampung berdasarkan RPJMN 2015-2019 lebih banyak berfokus pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan agar memberikan tarikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun begitu pembangunan di sektor lain seperti sosial, ekonomi, budaya, dan kebencanaan tetap diperhatikan namun lebih berfokus pada prioritas dan memiliki keurgensian yang mendesak.

Jaringan jalan dan simpul transportasi merupakan sektor infrastruktur yang dibangun dan dikembangkan untuk melancarkan arus barang sehingga perekonomian akan tumbuh lebih cepat. Hal ini dilakukan mengingat letak geografis Provinsi Lampung yang berada di ujung Pulau Sumatera yang menjadi penghubung dengan Pulau Jawa sehingga sektor transportasi harus lancar dan aman. Selain itu potensi ekspor hasil pertanian dan perkebunan Provinsi Lampung yang melimpah juga menjadi

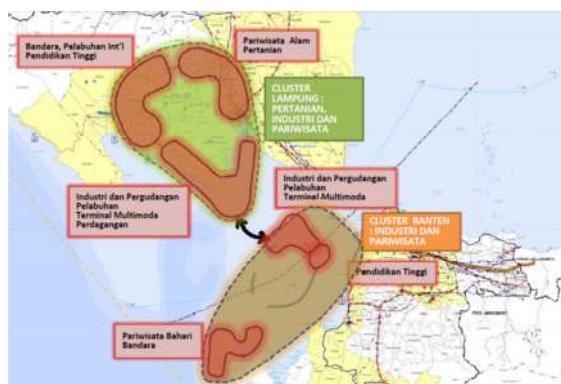
alasan utama dalam pengembangan sektor transportasi. Rencana pengembangan industri di luar Pulau Jawa yang berada di Provinsi Lampung seperti Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Lampung Selatan dan Kawasan Industri Maritim (KIM) di Tanggamus juga menjadi faktor dikembangkannya jaringan transportasi. Untuk mendukung kawasan industri tersebut pemerintah pusat juga melakukan pengembangan energi listrik agar perencanaan dapat berjalan dengan baik. Berikut tabel rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Lampung.

Pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) merupakan skala besar dan kompleks yang membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan terpadu. Selain itu, industri dalam negeri diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan KSISS.

Pembangunan KSISS akan mengerakkan pembangunan ekonomi nasional sehingga memerlukan dukungan investasi, peraturan perundangan, *political will* dan perkuatan kelembagaan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda, bila meninjau potensi ekonomi dari Kawasan Strategis Selat Sunda, maka akan terlihat betapa urgennya pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan Provinsi Lampung dan Banten.

Gambar 2
Klaster Kawasan Strategis Provinsi Lampung



Sumber: Presentasi Wakil Menteri PU, 2012

Selanjutnya sebagai upaya lanjutan, maka dilakukan percepatan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). WPS dikembangkan berdasarkan terutama daya dukung dan daya tampung, lingkungan fisik terbangun, serta Nawacita dan RPJMN.

WPS yang dimaksud ialah kawasan pengembangan pelabuhan, kawasan strategis pariwisata nasional, pengembangan kawasan industri,

pengembangan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang mendukung lumbung pangan serta keterpaduan terhadap kota-kota. WPS juga menstimulus pembangunan infrastruktur agar secara bersamaan klaster industri yang terdapat dalam wilayah tersebut dapat tumbuh cepat. WPS tersebut terkoneksi antara infrastruktur dan dipadukan dengan infrastruktur lainnya ke kawasan perkoaan. Dampak lain yang bisa dirasakan adalah meningkatnya distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk maupun tenaga kerja di Kota Metro (Provinsi Lampung).

Gambar 3
Konsepsi Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera



Sumber: Dari Berbagai Sumber, 2015.

GEOSTRATEGIS LAMPUNG

Trans Asian Railways and Highways atau dikenal sebagai *Asian Highway Network*, atau dikenal dalam bahasa indonesia adalah Jaringan Jalan Asia merupakan sistem jalan raya di Asia. Pembangunan proyek besar yang melibatkan Asia dan Eropa terdiri dari pembangunan *Trans Asia Highway* dan *Trans Asia Railway*.

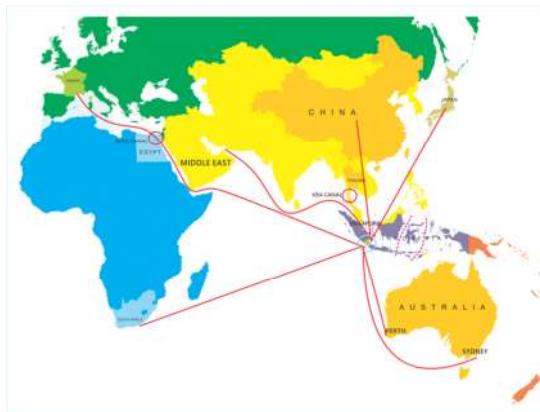
Proyek ini merupakan proyek fasilitasi transportasi perjalanan darat yang menyatukan Benua Asia kemudian

bersambung sampai dengan Benua Eropa. Jaringan Jalan Asia di Indonesia melintasi wilayah Indonesia yakni rute bagian barat Pulau Bali dengan menghubungkan seluruh kota-kota utama sampai dengan wilayah bagian utara Pulau Jawa hingga Singapura dan Malaysia terus hingga ke Khosravi, Iran. Sedangkan rute berikutnya yang melewati Indonesia ialah rute yang dimulai dari Banda Aceh meliputi wilayah sisi timur seluruh kota-kota utama di

Pulau Sumatera hingga ke seluruh wilayah sebelah selatan Pulau Jawa terus hingga sampai dengan Pulau Bali.

Gambar 4

**Posisi Strategis Provinsi Lampung
Ditinjau dari Konstelasi Pelayaran
Internasional**



Sumber: Dari Berbagai sumber, 2015

Di Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Asia ialah Jalan Lintas Sumatera. Jalan Lintas Sumatera adalah sebuah jalan raya yang membentang dari utara sampai selatan Pulau Sumatera. Diawali dari Banda Aceh hingga Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung. Total panjang ruas Jalan Lintas Sumatera adalah 2.508,5 km. Saat ini terdapat 4 jalan utama di Pulau Sumatera, yaitu Jalan Raya Lintas Barat (Jalinbar), Jalan Raya Lintas Tengah (Jalinteng), Jalan Raya Lintas Timur (Jalintim), dan Jalan Raya Lintas Pantai Timur.

Menurut Undang-Undang mengenai Perairan Indonesia No.6 Tahun 1996,

Pemerintah Indonesia menentukan alur laut, termasuk rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal dan pesawat udara asing dan juga dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui alur laut.

Alur Laut Kepulauan Indonesia ialah HAK alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing tersebut di atas laut untuk dilaksanakan Pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar Pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselanggara secara menerus, cepat dan dengan tidak terhalang oleh ruang dan udara Perairan Teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dapat digunakan sebagai lalu lintas pelayaran internasional sebagai berikut:

- a. ALKI I terdiri dari alur Selat Sunda, Karimata, Natuna dan Laut China Selatan.
- b. ALKI II melalui Selat Lombok, Makassar dan Laut Sulawesi.
- c. ALKI III berkaitan dengan alur laut yang ada di Laut Timor dan Laut Arafuru yang dikelompokkan dalam ALKI III-A melalui laut Sawu-Ombai, Laut Banda (bagian Barat P. Buru), Laut Seram, Laut Maluku dan Samudra Pasifik. ALKI III-B melalui Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda bagian Barat P. Buru), laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik. ALKI III-C yaitu Laut Arafuru, Laut Banda (bagian barat P. Buru), Laut Seram, Laut Maluku dan Samudra Pasifik.

Zonasi kawasan potensial dikembangkan berdasarkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan penilaian, kawasan Teluk Lampung dan Teluk Semangka merupakan kawasan yang sangat direkomendasikan untuk dikembangkan karena karakteristik wilayahnya mendukung kegiatan maritim. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

Wilayah yang direkomendasikan di Pesisir Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 5
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia



Sumber: Dari berbagai sumber, 2015

PEMETAAN POTENSI

Gambar 6
Peta Rekomendasi Wilayah Pengembangan Pesisir di Provinsi Lampung

Pada bagian ini juga dijelaskan secara spasial keberadaan kawasan strategis dikaitkan dengan WPS. Perlu diketahui



Sumber : Hasil Analisis, 2015

Konsep pengembangan kawasan strategis yang telah teridentifikasi adalah melalui konsep wilayah pengembangan strategis (WPS). Konsep ini mengintegrasikan antara infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim. Jika mengaitkan dengan kondisi empiris, maka provinsi Lampung memiliki potensi pesisir yang meliputi potensi pelabuhan, destinasi wisata, perikanan.

bahwa walaupun disebut dengan terminology struktur pengembangan tetapi sesungguhnya berbeda dengan struktur tata ruang di dalam rencana tata ruang wilayah. Maksud berbeda adalah karena struktur pengembangan ini dilandasi oleh potensi pesisir dan kelautan yang dimiliki oleh Lampung dikaitkan dengan kondisi eksisting seperti keberadaan kawasan perkotaan dan industri.

Tabel 2
Pembobotan Untuk Menentukan
Wilayah Potensial

No	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Skoring
Sangat direkomendasikan			
1	Bandar Lampung	Panjang	31
2	Tanggamus	Kota Agung Timur	31
3	Tanggamus	Limau	31
4	Tanggamus	Cukuh Balak	31
5	Tanggamus	Kalumbayan	31
6	Tanggamus	Pematang Sawa	31
Direkomendasikan			
7	Lampung Selatan	Bakauheni	29
8	Lampung Selatan	Kalianda	29
9	Lampung Timur	Labuhan Maringgai	29
10	Pesawaran	Padang Cermin	29
11	Pesawaran	Punduh Pidada	29
12	Tanggamus	Kalumbayan Barat	28
13	Tulang Bawang	Dente Teladas	29
14	Tulang Bawang	Rawajitu Timur	29
15	Bandar Lampung	Bumi Waras	27
16	Pesisir Barat	Pulau Pisang	27
17	Tanggamus	Kota Agung	27
18	Tanggamus	Wonosobo	26
19	Tanggamus	Kota Agung Barat	26

Maritim. Selain itu, sekitar 13 kecamatan masuk kategori direkomendasikan.

Bandar Lampung tidak memiliki kawasan industri yang masif namun lokasi industri terdapat di Lampung Selatan. Di dalam hal ini, Bandar Lampung menjadi hub bagi produk industri dan komoditas lainnya yang diangkut melalui dan dari pelabuhan. Pola ini telah berjalan secara empiris di lapangan. Pengembangan dapat dilakukan dengan memperbesar kapasitas produksi industri. Keterbatasan utama di dalam hal ini adalah kapasitas lahan Pelabuhan Panjang yang sangat terbatas. Apabila diperhatikan di sekitar kawasan Pelabuhan Panjang telah di kelilingi oleh kawasan terbangun. Untuk menjadi pelabuhan yang lebih besar lagi merupakan tantangan yang sangat berat.

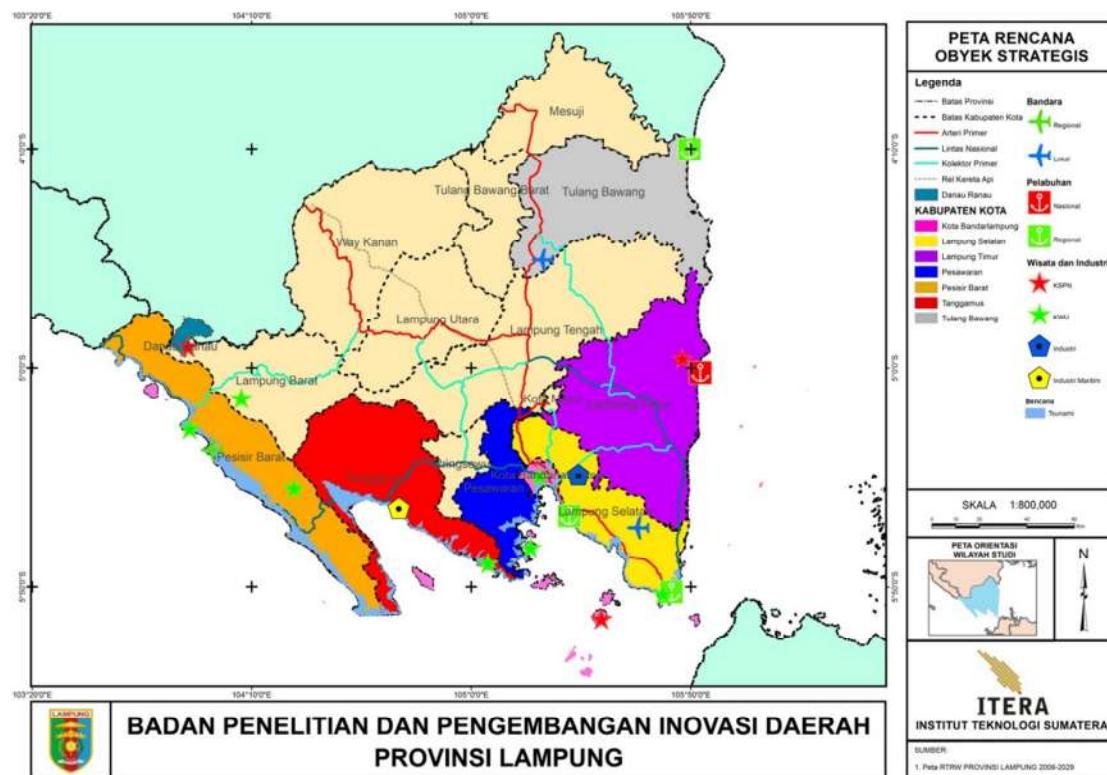
Sumber: Hasil Analisis, 2015

Dari sebanyak 114 kecamatan di seluruh Lampung yang terkait dengan potensi pesisir dan kelautan diperoleh sekitar 6 Kecamatan yang masuk kategori wilayah sangat direkomendasikan untuk mendukung Lampung sebagai Poros

Gambar 7

Sebaran Obyek Strategis di Provinsi Lampung

Kawasan strategis di Kabupaten Tanggamus memiliki lokasi untuk *urban*



Sumber: Hasil Survey, 2015

Potensi lainnya adalah pembangunan perkotaan yang berwawasan pesisir. Salah satu konsep yang dapat dikedepankan adalah konsep *Water Front City* (WFC). Pembangunan WFC yang didasari oleh wawasan lingkungan dapat menguntungkan secara ekonomi karena berpotensi meningkatkan wisatawan dan memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk dapat menikmati kawasan pesisir.

area, industri sekaligus hub (pelabuhan) dan wisata. Keberadaan kawasan industri maritime di kecamatan Limau-Cukuh Balau dan sebagian Kota Agung Timur merupakan faktor pendorong utama. Luas yang dialokasikan antara 2000-4000 ha merupakan luas yang sangat ideal untuk dikembangkan menjadi lokasi pelabuhan dan terintegrasi dengan industri.

REKOMENDASI

Strategi untuk mengembangkan Provinsi Lampung sebagai poros Maritim Indonesia dapat dibagi menjadi dua pendekatan, spasial dan aspasial. Pendekatan pertama melalui kerangka kebijakan secara umum (aspasial) dan kedua melalui pendekatan kebijakan penataan ruang (spasial).

Secara nyata, di dalam kajian ini, terdapat hierarki dari tingkat global, Asia, Asia Tenggara, Indonesia, Provinsi dan Kabupaten dan Kota. Provinsi Lampung sebagai di dalam hal ini pada level global adalah alur pelayaran internasional yang berbasis pada kepentingan ekonomi dan pertahanan. Aspek ekonomi sebagaimana prinsip ekonomi, memperbesar keuntungan dengan meminimalkan kerugian, hal ini juga berlaku untuk kompetisi menentukan daya tarik ekonomi. Apabila Indonesia, di dalam hal ini Provinsi Lampung menawarkan daya tarik secara ekonomi maka akan dapat menarik investasi atau pembangunan infrastruktur.

Untuk itu beberapa strategi yang diusulkan dalam kerangka kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Menawarkan kemudahan dalam berinvestasi

Kemudahan investasi merupakan kunci untuk menangkap peluang dari berbagai potensi yang ada. Di dalam kerangka untuk menarik potensi poros maritim maka potensi investasi yang masuk dapat berasal dari investor global. Sehingga kemudahan investasi merupakan suatu keharusan.

2. Ketersediaan Lahan

Hampir seluruh pembangunan infrastruktur terkendala oleh masalah lahan. Bagi daerah yang dapat menyediakan lahan strategis maka akan dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat atau pihak swasta. Saat ini banyak sekali program-program yang membutuhkan ketersediaan lahan yang luas dan strategis. Apabila dapat memanfaatkan potensi ini, bukan tidak mungkin Provinsi Lampung akan dapat menjadi poros Maritim Indonesia.

Sebagai contoh, saat ini Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pintu gerbang ekspor dari Provinsi Lampung. Namun

untuk meningkatkan kapasitasnya memiliki kendala ketersediaan lahan. Saat ini lahan pelabuhan Panjang hanya sekitar kurang lebih 168 Ha. Bila dibandingkan dengan 3 pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, Pelabuhan Singapura (600 Ha), Pelabuhan Tanjung Pelepas Malaysia (809 Ha), Pelabuhan Klang Malaysia (57.300 Ha) maka secara luas lahan sudah sangat tidak memadai. Terlebih lagi di sekitar Pelabuhan Panjang telah menjadi kawasan permukiman padat penduduk.

Potensi yang saat ini tinggi dari Kawasan Industri Maritim di Tanggamus juga karena didukung oleh ketersediaan lahan yang dimiliki oleh perusahaan swasta Negara, PT Pertamina seluas 2000 ha. Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana dapat membebaskan lahan lainnya untuk mendukung pembangunan yang terintegrasi dan secara ekonomi menjadi menarik bagi industri.

3. Wisata Unggulan dan Terpadu Provinsi Lampung memiliki destinasi wisata yang berskala internasional. Diantaranya adalah wisata anak gunung Krakatau dan Tanjung Setia

Pesisir Barat. Tidak saja hanya Bagi wisatawan dalam negeri dan mancanegara, kemudahan informasi yang terintegrasi dan akses menuju destinasi wisata merupakan suatu kebutuhan mendasar. Apabila hal ini dapat terpenuhi maka dapat membantu meningkatkan pengunjung ke Provinsi Lampung.

4. Infrastruktur yang Handal

Potensi alamiah seperti keindahan alam dan geografis belum cukup untuk dapat menjadi Provinsi Lampung sebagai poros maritim Indonesia. Diperlukan dukungan infrastruktur yang handal. Gambaran handal adalah infrastruktur yang dapat mendukung berbagai macam peruntukan. Misalnya jalan arteri primer yang dapat mendukung pergerakan logistik antarprovinsi dapat digunakan tanpa banyak kendala teknis maupun nonteknis.

5. Konektivitas Wilayah

Provinsi Lampung memiliki potensi pesisir yang berada di berbagai sudut wilayah. Potensi tersebut membentang luas sehingga diperlukan penghubung antarwilayah yang memadai. Penghubung yang dimaksud

dapat berupa transportasi udara, darat dan laut berikut dengan infrastruktur dan suprastrukturnya.

6. Kesiapan Proposal

Proposal di dalam hal ini adalah satu kesatuan penawaran baik ditujukan kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta.

7. Pemasaran yang luas

Salah satu poin penting lainnya adalah proses pemasaran potensi yang telah dimiliki oleh Provinsi Lampung. Promosi dilakukan untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki Provinsi Lampung. Harapannya apabila potensi ini dikenal dengan berbagai keunggulannya investasi dan program pemerintah dapat masuk dan mendukung tercapainya Provinsi Lampung sebagai poros Maritim Indonesia.

Strategi di dalam hal ini adalah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dalam rangka menjadikan provinsi Lampung sebagai poros maritim Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa zonasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai poros maritim Indonesia di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian tersebut maka untuk

mengejawantahkan Provinsi Lampung sebagai Poros Maritim diperlukan strategi berikut dalam kerangka penataan ruang:

1. Dukungan dalam rencana tata ruang

Penataan ruang adalah payung dari pengembangan ruang di suatu wilayah. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang diakomodasi di dalam penataan ruang sehingga seluruh rencana pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Rencana tata ruang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang pulau Sumatera (RTR Pulau Sumatera), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, dan RTRW Kabupaten Kota. Sebagai contoh apabila mengusulkan pembangunan pelabuhan diperlukan sinkronisasi rencana-rencana tersebut sehingga tidak saling menegasikan.

2. Optimalisasi Terhadap Lahan Budidaya dan Konservasi

Ketika berbicara tentang wilayah pesisir, maka akan bertemu dengan kawasan yang sangat ringkih. Di dalam hal ini, apabila tata kelola yang tidak baik akan menyebabkan kerusakan yang berdampak sangat luas. Hampir 60 lebih wilayah Lampung memiliki pantai. Hal ini potensi

sekaligus peringatan bahaya besar kerusakan lingkungan di pesisir. Strategi di dalam hal ini adalah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dalam rangka menjadikan provinsi Lampung sebagai poros maritim Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa zonasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai poros maritim Indonesia di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian tersebut maka untuk mengejawantahkan Provinsi Lampung sebagai Poros Maritim diperlukan strategi berikut dalam kerangka penataan ruang:

1. Dukungan dalam rencana tata ruang

Penataan ruang adalah payung dari pengembangan ruang di suatu wilayah. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang diakomodasi di dalam penataan ruang sehingga seluruh rencana pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Rencana tata ruang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang pulau Sumatera (RTR Pulau Sumatera), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, dan RTRW Kabupaten Kota. Sebagai contoh apabila mengusulkan

pembangunan pelabuhan diperlukan sinkronisasi rencana-rencana tersebut sehingga tidak saling menegasikan.

2. Optimalisasi Terhadap Lahan Budidaya dan Konservasi

Ketika berbicara tentang wilayah pesisir, maka akan bertemu dengan kawasan yang sangat ringkih. Di dalam hal ini, apabila tata kelola yang tidak baik akan menyebabkan kerusakan yang berdampak sangat luas. Hampir 60 lebih wilayah Lampung memiliki pantai. Hal ini potensi sekaligus peringatan bahaya besar kerusakan lingkungan di pesisir. Strategi di dalam hal ini adalah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dalam rangka menjadikan provinsi Lampung sebagai poros maritim Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa zonasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai poros maritim Indonesia di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian tersebut maka untuk mengejawantahkan Provinsi Lampung sebagai Poros Maritim diperlukan strategi berikut dalam kerangka penataan ruang:

1. Dukungan dalam rencana tata ruang

Penataan ruang adalah payung dari pengembangan ruang di suatu

wilayah. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang diakomodasi di dalam penataan ruang sehingga seluruh rencana pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Rencana tata ruang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang pulau Sumatera (RTR Pulau Sumatera), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, dan RTRW Kabupaten Kota. Sebagai contoh apabila mengusulkan pembangunan pelabuhan diperlukan sinkronisasi rencana-rencana tersebut sehingga tidak saling menegasikan.

2. Optimalisasi Terhadap Lahan Budidaya dan Konservasi

Ketika berbicara tentang wilayah pesisir, maka akan bertemu dengan kawasan yang sangat ringkih. Di dalam hal ini, apabila tata kelola yang tidak baik akan menyebabkan kerusakan yang berdampak sangat luas. Hampir 60 lebih wilayah Lampung memiliki pantai. Hal ini potensi sekaligus peringatan bahaya besar kerusakan lingkungan di pesisir. Strategi di dalam hal ini adalah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dalam rangka menjadikan provinsi Lampung sebagai poros maritim Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa zonasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai poros maritim Indonesia di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian tersebut maka untuk mengejawantahkan Provinsi Lampung sebagai Poros Maritim diperlukan strategi berikut dalam kerangka penataan ruang:

1. Dukungan dalam rencana tata ruang

Penataan ruang adalah payung dari pengembangan ruang di suatu wilayah. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang diakomodasi di dalam penataan ruang sehingga seluruh rencana pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Rencana tata ruang meliputi rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang pulau Sumatera (RTR Pulau Sumatera), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, dan RTRW Kabupaten Kota. Sebagai contoh apabila mengusulkan pembangunan pelabuhan diperlukan sinkronisasi rencana-rencana tersebut sehingga tidak saling menegasikan.

2. Optimalisasi Terhadap Lahan Budidaya dan Konservasi

Ketika berbicara tentang wilayah pesisir, maka akan bertemu dengan kawasan yang sangat ringkih. Di dalam hal ini, apabila tata kelola yang tidak baik akan menyebabkan kerusakan yang berdampak sangat luas. Hampir 60 lebih wilayah Lampung memiliki pantai. Hal ini potensi sekaligus peringatan bahaya besar kerusakan lingkungan di pesisir.